



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I (satu)
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 14 September 2020
Waktu	: 16.00-18.20 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 2. RKA K/L Tahun 2021 3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI 4. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI : dari 43 orang 54 Anggota Komisi IV dengan rincian :
	1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 10 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, SE./Ketua Komisi IV DPR RI 2. Ir. Mindo Sianipar 3. Ir. Effendi Sianipar 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 5. Vita Ervina, S.E., MBA. 6. Drs. I Made Urip, M.Si.

7. H. Yadi Srimulyadi
8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
9. Maria Lestari, S.Pd.
10. Riezky Aprilia, SH., MH.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Budhy Setiawan
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
 6. Alien Mus, S.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
7 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budiastrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Hendro Hermono, M.B.A
 4. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 3. Ir. Charles Meikyansah
 4. Julie Sutrisno
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, s.Sos, M.Si.
 4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. Dr. H. Andi Akmal Pasludin, S.P., M.M
 4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. H. Muhammad Syafarudin, ST., M.M.
 3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
 4. Slamet Ariyadi, S.Psi.
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul Chusnah
- B. Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
 10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani), virtual;
18. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I), virtual;
19. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II), virtual;
20. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III), virtual;
21. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV), virtual; dan
22. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V), virtual.

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Tapi Pimpinannya tidak ada yang lain.

Yang terhormat Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani yang melalui virtual,
Yang terhormat Direktur Utama Inhutani I sampai V juga secara virtual,
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan acara rapat Persidangan Rapat I Tahun 2020-2021 yang diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus pada tanggal 13 Juli 2020 dan keputusan Rapat Internal tanggal 24 Agustus pada hari ini Senin, 14 September kami Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2020, RKA K/L 2021 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV serta isu-isu lainnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai Pukul 16.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan dengan Pasal 254 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri LHK,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Menteri LHK,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa tugas Komisi dalam Bidang Anggaran terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN beserta nota keuangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1)

Peraturan Tata Tertib yang menjelaskan bahwa Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kementerian/Lembaga hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis untuk dilakukan sinkronisasi. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja pada hari ini adalah berdasarkan surat Pimpinan Anggaran Nomor: AG/10720/DPR-RI/IX/2020, tanggal 11 September 2020. Hal: penyampaian jadwal pembahasan rencana Undang-Undang tentang APBN Tahun 2021.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Rapat Kerja ini merupakan tindak lanjut dari RDP sebelumnya dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepada Badan Restorasi Gambut, pada tanggal 9 September yang lalu.

Pada rapat kali ini Komisi IV meminta penjelasan kepada Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas RKA K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021, dan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021, dengan beberapa point penting hasil kesimpulan RDP yang lalu diantaranya:

1. Komisi IV menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas rancangan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L 2021 sebesar Rp7.957.114.783.000,00-. Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap rancangan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021, sesuai edaran, saran dan masukan Komisi IV dalam Rapat Dengar Pendapat sebagai bahan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Komisi IV menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rencana program yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 senilai 700 Miliar Rupiah.
3. Komisi IV mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan sebagai tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yakni percepatan pemulihan dan penguatan reformasi. Selanjutnya Komisi IV meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi anggaran dengan titik berat kepada program yang berdampak langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan. Termasuk didalamnya program pengembangan Desa Wisata disekitar kawasan hutan serta program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan nasionalisasi terhadap pagu anggaran pada Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja

pengawasan internal dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saudari Menteri,

Kemarin saya mengkritik karena Inspektorat dananya kecil sekali. Jangan sampai ini Inspektorat Ibu ke Lampung atau ke Medan dijemput mobil, diajak makan dibayarin hotel dikasih oleh-oleh. Kalau dia tidak cukup ya kemungkinan dibawahnya akan berbuat seperti itu. Kalau sudah sulit seperti itu kan berarti tidak objektif.

Selanjutnya pada kesempatan Rapat Kerja hari ini kami Komisi IV juga meminta penjelasan kepada Saudara Menteri isu penting terkini yaitu konflik tenorial di area perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Desa Kiripan Kecamatan Batang Kara, Kabupaten Lamandao, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang konon katanya bekingnya sangat kuat sekali.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut diatas.

Silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Dr. Ir. SITI NURABAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Yang kami hormati Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,
Kawan-kawan dari eksekutif.

Pertama kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini dapat dilakukan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi secara tulus kepada Pimpinan, yang terhormat Pimpinan dan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI atas arahan, catatan, dan bimbingan kepada Kementerian untuk bisa selalu bekerja dengan baik memenuhi harapan masyarakat.

Rapat Kerja hari ini sebagaimana tadi telah disampaikan oleh yang terhormat Ketua bahwa berdasarkan surat dari yang terhormat Pimpinan DPR RI mencakup materi evaluasi kegiatan 2020, kemudian Rencana Kerja

Anggaran KLHK atau RKA K/L Tahun 2021, dan secara khusus juga tentang Dana Alokasi Khusus, dan isu aktual terkait dengan masalah Desa dan konsesi di Lamandao. Materi tertulis telah kami sampaikan. Mudah-mudahan telah sampai di harapan yang terhormat Pak Ketua, Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Ijin kami untuk masuk kepada materi pada bagian pertama yaitu "Evaluasi Kegiatan Tahun 2020". Berdasarkan hasil evaluasi OM-SPAN pada posisi pada tanggal 14 September, realisasi telah mencapai 47,79% dari realisasi nasional rata-rata 54,01%.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat,

Saya mohon ijin melaporkan bahwa semula sebetulnya posisi KLHK itu sudah di 52% dengan rata-rata nasional pada tanggal 10 September itu 53%. Jadi KLHK sudah 52,56%. Kemudian pada tanggal 11 September kita mendapatkan pagu tambahan seperti yang telah dilaporkan pada saat RDP oleh Pak Sekjen sebesar 812 Miliar Rupiah sehingga total anggaran KLHK menjadi kira-kira 8,4 sampai 8 koma Triliun dari semula kira-kira 7,6 Triliun. Dengan demikian realisasi per tanggal hari ini pada pukul 12.00 adalah 47,49%, dan kami akan terus mengejar realisasi ini dengan program-program yang dipersiapkan.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya dari anggaran pada Tahun 2020 dapat kita lihat evaluasi atau hasil pada sasaran fungsional secara politik yaitu misalnya terkait dengan perhutanan sosial. Di perhutanan social telah dihasilkan seluas jumlah SK yang dikeluarkan 260, kemudian dengan luas areal yang untuk hutan social 162.000 hektar. Dengan total dari Tahun 2015 mencapai 4,206 juta hektar bagi 865.000 KK. Pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada screen 7 mohon periksa Bapak/Ibu yang kami hormati, terlihat kami laporkan bahwa jumlah hotspot pada hari ini tercatat 1453 hotspot, dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama yaitu 1 Januari sampai 14 September jumlah hotspot 14.882. Dengan demikian berarti yang sekarang ini jumlah hotspotnya kira-kira hanya lebih kurang 10% lebih dibandingkan dengan yang lalu. Dengan kata lain penurunannya cukup tajam.

Saya mohon ijin melaporkan didalam halaman 7 ini areal terbakar menurut data satelit yang dianalisis oleh KLHK dan telah diverifikasi 64.602 hektar, dan pada per Agustus kami sudah cek ke Planologi kurang lebih menjadi 120.000 hektar yang terbakar. Di tahun lalu areal yang terbakar pada Januari-Juli kira-kira 137.000, dan Januari-Agustus kira-kira 320.000. Jadi eskalasi kebakarannya pada tahun lalu hampir 3 kali lipat, dan sekarang sudah kita reduksi dan hanya kurang dari 2 kali lipat. Tentu kita masih menjaga terus sampai dengan bulan September dan Oktober.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Kami laporkan bahwa dengan dukungan dana siap pakai (*on call budget*) di PNPB termasuk juga ada 1 helikopter dari KLHK. Pada saat ini stanby 14 heli di Riau, 8 heli di Kalbar, 9 heli di Kalteng, dan 11 di Sumatera Selatan. Ini daerah-daerah rawan yang kita jaga betul. Terdapat memang kebakaran-kebakaran di *sported sporadic* tetapi bisa langsung diatasi Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri,

Saya mau tanya sedikit, fungsinya Kepala Daerah, Gubernur, Bupati itu apa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Satgas Pak Ketua. Operasi lapangannya memang mereka yang pimpin.

KETUA RAPAT:

Cuma Satgas?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Ke lapangan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Di lapangan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mereka di lapangan?
Gubernur di lapangan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Beberapa Gubernur berada dilapangan. Saya mengikuti.

KETUA RAPAT:

Kalau Gubernur Kalimantan Tengah di lapangan atau di lapangan sepak bola depan rumahnya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Yang bersama saya dan saya tahu itu Riau, Kalimantan Barat.

KETUA RAPAT:

Yang lain tidak jelas?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Yang lain saya tidak sempat bersama-sama kecuali ada Kunjungan resmi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kecuali ada ceremonial begitu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kunjungan resmi Pimpinan misalnya Menhut dan lain-lain.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu bakalnya agak lama dipadamkannya kalau yang tidak aktif Kepala Daerahnya.

Iya lanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Iya Pak Ketua.

Tetapi sih sebetulnya lebih berharap jangan ada apa-apa sehingga tidak harus ke lapangan juga. Jadi kami berusaha untuk menjaganya dengan teknik modifikasi cuaca. Sumatera Selatan juga termasuk yang Gubernurnya aktif di lapangan, saya tahu persis karena, dengan Dirjen juga dia ke lapangan. Beberapa rata-rata baik Ketua. Kecuali nanti beberapa hal yang Pak Ketua pada saya, saya akan perhatikan dengan baik. Disisi lain patroli terpadu terus kita siagakan.

Bapak Pimpinan,

Selanjutnya rehabilitasi hutan dan lahan. Saya kira ini sudah didalam RDP sudah banyak digali, saya percaya dikupas oleh para yang terhormat Anggota kepada para Dirjen dan juga Pak Sekjen. Demikian pula dalam hal pengelolaan sampah dan limbah, dan juga untuk wisata alam serta reforma agraria pada halaman 11 dan pengendalian deforestasi pada halaman 12, dan demikian pula pada penanganan white life dan juga tentang kayu, kayu olahan, ekspor kayu olahan, nilai ekspor dan lain-lain.

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya iijinkan kami melaporkan tentang Rencana Kerja Anggaran KLHK pada Tahun 2021. Kepada kami dilaporkan oleh Pak Sekjen hasil dari RDP untuk dapat dilakukan penyesuaian pagu anggaran Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan mohon ijin saya ingin melaporkan penyesuaian pagu anggaran yaitu pergeseran-pergeseran dari rencana semula yaitu untuk Sekretariat Jenderal. Kita tahun depan itu mendapat mandat dari UN environment untuk menjadi Presiden COP minamata. Minamata itu adalah konvensi untuk menangani mercury. Jadi mengatasi lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan karena mercury yang sudah cukup berat. Ada Undang-Undangnya untuk ini pada Tahun 2017, kemudian Undang-Undang ratifikasinya dan Indonesia diberi mandat sebagai Presiden COP yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November pada Tahun 2021 dan direncanakan di Bali dengan peserta antara 2000 sampai 3000 orang.

Bapak Pimpinan,

Untuk itu maka diperlukan persiapan venue yang kami minta Sekretariat Jenderal yang harus bertanggungjawab, tetapi juga ada persiapan untuk substansi dan lain-lain termasuk dalam dialog, diskusi dan pembicaraan-pembicaraan dengan berbagai negara di wilayah-wilayah Asia Pasifik, kemudian Afrika dan lain-lain yaitu alokasi dananya di Direktorat Jenderal PSLB3. Jadi kebutuhan ini mencapai 60 Miliar, dan selanjutnya Inspektorat Jenderal juga mendapatkan sebagai arahan yang terhormat Pimpinan, kami juga mendukung untuk intensitas pekerjaan dan pengawasan oleh Ibu Irjen. Apalagi sekarang saya lihat tugas pengawasannya sudah juga intensif di mulai dari sisi perencanaan. Jadi kami mendukung dengan penambahan pagu rencananya 10 Miliar, lalu Direktorat Jenderal PDASHL yang disesuaikan ditarik 100 Miliar, dan kemudian untuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebesar 15 Miliar.

Dengan demikian yang terhormat Pak Ketua dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya mohon ijin dan mohon perkenan persetujuan pagu anggaran KLHK untuk Tahun 2021 (mohon periksa pada halaman 17). Karena ini akan mendapatkan persetujuan saya mohon ijin membacakan satu per satu antara pagu dan unit kerja. Ijin Pak Ketua dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

1. Untuk unit kerja **Sekretariat Jenderal**, dengan pagu anggaran Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Unit **Inspektorat Jenderal**, dengan pagu anggaran Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. **Direktorat Jenderal PHPL**, Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

4. **Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung**, dengan nilai Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
5. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, dengan nilai Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
6. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Teknik Lingkungan PKTL**, dengan pagu Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. **Badan Litbang dan Inovasi**, dengan nilai Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
8. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, dengan pagu Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
9. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, dengan nilai Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
10. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, dengan pagu Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
11. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, dengan pagu Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
12. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun Berbahaya**, dengan pagu Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
13. **Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, dengan pagu Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
14. **Badan Restorasi Gambut**, dengan pagu Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya anggaran-anggaran dengan basis masyarakat mohon periksa pada halaman 18. Ini yang langsung masuk ke masyarakat yang dilengkapi dengan program-program yang ada di Kementerian LHK yang bisa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Selanjutnya kami mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri,

Mumpung saya ingat, kemarin ada protes dari Anggota perihal kebun bibit rakyat yang nilainya 1 batang hanya 2500. Apakah di 2021 ini pagu anggarannya bisa dinaikan? Karena kalau 50 Juta dibagi itu Cuma 2500, khawatirnya bibitnya asal-asalan, kan sama saja buang duit.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

... (suara tidak jelas).
Pak Hudoyo ada ya?

KETUA RAPAT:

Pak Hudoyo,

Kalau 2500 cukup tidak? Kalau cukup saya numpang Bapak suruh tanam, saya yang bayar.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Saya akan cek Ketua karena menyangkut standar. (Pak Ketua minta standar bibitnya, harganya).

Sudah dikonsultasikan ke Kementerian Keuangan karena kalau standar biaya kita konsulkan anggaran.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Eggak, nanti dalam konsultasi itu dijelaskan juga kalau 2500 bibitnya jelek, ditanam tidak hidup, alangkah baiknya misalnya ditambahkan jadi 3500 tapi bibitnya bagus dan bisa tumbuh, kan gitu aja. Ya Bu ya, tolong ya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Berarti dikaitkan dengan kualitas.

Baik Ketua, kami perhatikan untuk ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya terkait dengan Dana Alokasi Khusus. DAK bidang atau lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tadi juga sudah disampaikan dan juga saya kira sudah dilaporkan pada RDP yaitu 350 Miliar untuk LH, dan 350 Miliar juga untuk Kehutanan. Jadi LH kelihatannya meliputi pengelolaan sampah dan sarana-prasarana pendukung, dan juga *early warning system*

untuk penanganan polusi atau pun pencemaran. Dan dibidang Kehutanan menyangkut RHL dan pekerjaan sipil teknis, ataupun konstruksi bangunan-bangunan untuk pengendalian banjir, dan erosi, dan lain-lain serta sarana-prasarana ekonomi produktif dikaitkan dengan kelompok tani hutan.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,
Pak Ketua yang kami hormati,

Selanjutnya mohon periksa pada halaman 21 yaitu rincian menu DAK bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2021. Saya tidak henti-henti untuk meminta pertolongan, dukungan politik dari Komisi IV Pak Ketua karena menurut saya harusnya DAK-nya harus hitungan Triliun. Dengan kondisi kerusakan lingkungan yang seperti ini, karena kalau seluruhnya dari Pusat juga relative berat karena masalah-masalah lingkungan terutama itu eksternalitasnya adanya di Kabupaten, dan instrumennya yang paling pas adalah Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu waktu yang lalu dulu saya meminta FGD itu kita untuk menekankan prinsip-prinsipnya.

Kalau kita lihat daftar ini Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, ini ada yang tidak masuk disini karena memang dananya sangat besar seperti misalnya tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Itu dananya variasinya variantnya itu dari 45 sampai 60 Miliar hingga ke 150 Miliar. Jadi memang tergantung Kotanya, tergantung sampahnya, jumlah penduduk dan lain-lain, dan itu adanya di PU, bukan di KLHK. Juga yang kadang-kadang TPS juga tidak di KLHK, tapi kadang-kadang juga ada di KLHK. Tapi masuknya ke PU di program sanitasi. Ada juga pusat daur ulang yang banyak diminta ya. Itu juga kalau didorong di DAK juga sebetulnya bisa sangat baik. Kalau yang sub kehutanan kelihatannya mungkin nanti kita tinggal bicara volume saja tapi kalau prinsip-prinsipnya kelihatan tidak ada pergesekan apa-apa. Kalau di Kehutanan mungkin hanya di soal DAM. Jadi DAM penahan ini DAM yang paling kecil, harganya paling sekitar 5 Juta sampai paling gede 30 Juta, tapi kalau sudah cek DAM, DAM pengendali yang dulu sangat terkenal itu harganya sudah minimal 600 Juta. Itu masuknya di PU anggarannya. Jadi memang ada program-program kita yang bersama PU itu bergandengan sebetulnya. Saya tidak ingin mengatakan overlap karena pada dasarnya kriterianya bisa dibedakan tetapi saya mohon dukungan secara politis karena ini di Badan Anggaran dan biasanya DAK itu Pemda (bukan Provinsi) Kabupaten biasanya ke keuangan, ke dalam negeri dan juga sebagian ke kita. Jadi belum lembaga, belum berinternalisasi. Kalau kita lihat datanya mohon periksa.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri ini balik lagi. Yang kemarin sempat saya tanyakan, perihal misal alat angkut *Dump truck*, arm roll, pusat daur ulang. Ini diadakannya di Daerah kan. Bagaimana fungsi pengawasan dari harga, kualitas, mutu. Ini contoh. Pemerintah Kabupaten bertanya minta konsultasi ke BPK. BPK, baju APD berapa sih standar paling mahal? Oh paling mahal itu Rp280.000 per 1 stel. Ada. Saya tidak mengatakan semua wilayah. Ada yang Kabupaten itu membeli APD 120.000 tetapi dimasukkannya tetap 280.000. Kan tidak ada

barang buktinya. Barang buktinya kan dimusnahkan. Ini salah satu contoh. Kemudian misalnya nanti, saya tidak mau nanti disini sudah ada DAK, kemudian Dirjen Pengelolaan Sampah memberikan bantuan lagi mobil truk sampah, saya tidak mau. Karena dia sudah ada DAK berarti jangan alihkan ke yang lain, misalnya alihkan gini loh, dibuat kelompok pemulung, dibina. Modal kerja, kalau saya kasih kamu kerja modal kerja *Insha Allah* sebagian mungkin sama oknum dipakai kawin lagi. Tapi kalau dibuat penampungannya paling tidak kan digunakan. Ini saran saya. Karena kan kita suka melihat, wah kalau dikasih modal kerja ya sudah habis-habis saja apalagi tidak bakal masuk penjara. Kurang lebih begitu deh. Dan saya juga minta dengan hormat, tolong diperhatikan aspirasi Anggota Dewan untuk masyarakatnya. Karena kan saat ini masyarakat di kampung-kampung kan hidupnya susah, banyak juga yang di Jakarta PHK mudik ke kampung, banyak yang tidak ada pekerjaan, ya kita pikirkan bagaimana supaya rakyat kita hidupnya jangan susah-susah amat. Ya Bu ya.

Ya lanjut.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua.

Kalau DAK tugas utamanya KLHK adalah menyiapkan standar, pedoman dan kriteria. Dan itu harus disiapkan paling telat bulan Januari sudah harus ke Kabupaten. Karena DAK (Dana Alokasi Khusus) artinya spesifik grand oleh Pusat sudah dikasih ke Daerah. Jadi yang memeriksa memang instrumennya inspektur wilayah Kabupaten. Tetapi *double counting* Pak Ketua pasti akan ketahuan oleh BPK. Jadi memang dihindari.

Aspirasi Dewan, saya sangat mendukung itu karena pada dasarnya menurut saya lagi-lagi kalau dia dikawal oleh yang terhormat Anggota Dewan justru programnya jadi aman dilapangan secara fungsional, politik, sasaran sudah pasti akan baik. Saya juga minta Dirjen dengan dana yang baru kita peroleh 400 Miliar lebih untuk padat karya mangrove itu kita akan bersama-sama merangkumnya dengan keperluan di konstituensi Pak Ketua. Jadi itu nanti dengan tenaga ahli saya minta Pak Dirjen untuk terus bisa diintensifkan.

Selanjutnya iijinkan saya melanjutkan Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Kalau kita lihat rincian kegiatan dan lokasi itu mohon periksa pada halaman 22 sampai 44. Kita lihat misalnya DAK dengan menu pengelolaan sampah di destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, kemudian ada Bangka-Belitung, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara pada halaman 22. Ada juga DAK pengelolaan sampah untuk mendukung lingkungan sehat dalam penanganan stunting, misalnya pada halaman 23 dan 24. Disini ada data Provinsinya juga Kecamatannya pada halaman 23-24 untuk kesehatan lingkungan untuk stunting. Dan juga kalau kita lihat pada halaman 25 itu lagi-lagi untuk stunting untuk lingkungan yang sehat dengan menu yaitu online monitoring untuk

pencemaran air. Jadi di halaman 25. Kemudian DAK juga untuk pencemaran air bagi lingkungan sehat program stunting yaitu uji lab kualitas air dan mercury pada halaman 26.

Demikian juga kalau kita lihat yang di bidang lingkungan hidup untuk sumber benih ketahanan pangan pada halaman 27 di Sumatera Barat, Babel, Yogya, Jatim dan seterusnya.

Selanjutnya kalau kita lihat yang untuk RHL untuk mendukung program pangan pada halaman 28 mohon periksa sampai dengan 39, di 320 lokasi atau Kecamatan. Jadi yang isinya adalah rehab mangrove, kemudian hutan rakyat dan penahan (gambar-gambar DAM-nya mana?) Ada ya? Pasang dong. Terus saja, kita tidak akan baca satu per satu.

KETUA RAPAT:

Cuma kayaknya kalau lihat dari daftar ini lampu tidak ada ya Bu ya mangrove.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Pak Ketua, itu minta maaf tergantung Kabupatennya rajin apa enggak. Itu sebabnya saya lagi berpikir sangat keras bagaimana kita bisa mempengaruhi juga secara politis supaya daerahnya bagus. Harusnya sih sudah diatas Triliun menurut saya. Seharusnya sudah diatas 1 Triliun yang terhormat Pak Andi.

KETUA RAPAT:

Karena Mbak Kiki juga bilang Sumsel yang Gubernurnya, sahabatnya Ibu Menteri kok tidak ada juga katanya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ini harus sama-sama kita mendukungnya. Kalau saya bisa sendirian pasti sudah saya lakukan Pak Ketua. Tapi ini kaitannya.

KETUA RAPAT:

Mungkin tidak kami minta dulu yang reguler untuk 2-3 Kabupaten di Lampung, begitu juga untuk di Sumsel, bisa tidak? Tidak pakai dana DAK, pakai reguler.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Semua ini kan di kombinasi Ketua. Ini kan kita lakukan juga ... dan pengendali. Ini sebetulnya bangunan-bangunan air yang sangat murah. Ada yang Cuma 2 juta, ada Cuma 3 juta, itu contohnya pakai bronjong. Harga bronjongnya itu 1 meter kubik itu kira-kira Rp230.000,-. Harga batunya Rp200.000,- harga kawatnya. Jadi seseorang itu kalau di rakyat, masyarakat

kalau dia kita titipin bikin bronjong batunya harganya Rp200.000,-. Ngangkutnya dari kali sambil ngetok-ngetoknya transportnya Rp80.000,-. Ngetok-ngetoknya Rp230.000,-. Harga kawatnya Rp200.000,-. Jadi sebetulnya lumayan ini yang bercirikan padat karya seperti ini di APBN kita juga ada Pak Ketua. Jadi nanti yang tadi pesanan-pesanan yang terhormat Anggota untuk Kabupaten yang diorientasikan yang tidak ada di DAK saya kira Pak Dirjen bisa ya? Pak Hudoyo ya? Bisa Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Hudoyo jangan bilang iya-ya tapi nanti tidak dijalani. Karena yang.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kayak Pak Suhardi itu kami control terus nanti Pak.

KETUA RAPAT:

Begitu Bu, yang kami pikirkan di Lampung Timur itu abrasinya sudah gila-gilaan. Mungkin 20 tahun lalu sampai sekarang kalau 5 kilometer sudah habis Bakaheuni. Di Lampung Timur terakhir saya nih meninjau sama Menteri Kelautan wah sudah jauh sekali. Nah kemudian juga wilayah misalnya Pesawaran. Pesisir Barat sebagian besar dibikin tambak udang. Ini kan yang rasanya kalau bukan kita siapa lagi yang mau jaga.

Ya Pak Hudoyo, ingat ya? Kalau bisa tahun ini kita laksanakan, tahun depan. Ya bertahaplah. Saya juga tidak nuntut sebanyak-banyaknya. Cuma jangan lupa juga Pimpinan bayangan saya juga wilayahnya Sumatera Selatan ya.

Lanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya DAK untuk menu alat produktif mendukung ketahanan pangan, ini baru 3 Provinsi saya lihat. Tadi lanjutannya sampai 44 dan saya kira itu bagiannya.

Kemudian yang terakhir Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Terkait dengan kronologis persoalan-persoalan adat Laman Kinipan. Saya mohon izin melaporkan seluruhnya ada di halaman 46 sampai dengan halaman 66. Jadi yang terhormat Pimpinan Pak Dedi Mulyadi juga ke lapangan bersama Pak Wamen, yang terhormat Pak Dori juga dilapangan tapi ijin saya secara formal melaporkan bahwa. Sebetulnya sejak Tahun '78 aliansi masyarakat adat nusantara itu pernah melaporkan perampasan

wilayah adat oleh PT Sawit Mandiri. Kemudian waktu itu KLHK menjawab memang kalau belum dilaporkan dan tidak ada komunikasinya memang tidak bisa olah kita. Karena Pak Ketua, dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat kalau Birokrasi itu kan bisnisnya filing and writing. Jadi kalau tidak ada di filing tidak pernah ditulis berarti komunikasinya masih belum bisa jalan. Dan waktu itu dijawab, dan kemudian ada laporan dari komunitas adat untuk minta pengakuan adat. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang saya kira Pimpinan yang terhormat juga tahu persis karena Undang-Undang 41 itu diolahnya di Komisi IV bahwa untuk pengakuan langsung hutan adat penetapan deliniasi SK itu harus ada Peraturan Daerahnya.

Nah kemudian pada bulan November juga KLHK dilaporkan kepada Pak Wamen permohon tindak lanjut, ada persoalan konflik dan diarahkan lagi bahwa ini ada kaitannya akhirnya dengan lembaga masyarakat hukum adatnya. Selalu akan ada kalau hutan dan menjadi hutan adat itu selalu ada 2 hal Pak Ketua. Pertama kalau dia di hutan wilayahnya itu urusan kehutanan tapi masyarakat adatnya sendiri untuk urusannya Pemerintah Daerah yang dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Oleh karena itu penyelesaian Perdanya itu harus ada. Itu ada Permendagri Nomor 52 yang memberikan guidance itu. Dan KLHK sementara ini sebetulnya berpikirnya seperti itu, tetapi kami kemudian memberikan jalan keluar. Jadi sebelum Perdanya selesai kalau pernah diusulkan dan diverifikasi maka kita deliniasi dulu bahwa wilayah ini adalah wilayah yang harus untuk hutan adat, kira-kira begitu sehingga tidak boleh diapa-apain. Itu posisinya dalam kaitan dengan hutan adat, dari sisi masyarakat adatnya. Kemudian pada tanggal 29 Juli Pak Effendi Buhing diketahui oleh Kepala Adat dan Kepala Desa mengajukan penetapan hutan adat. Ini dari sisi persoalan wilayahnya.

Kemudian dikaitkan dengan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk PT atau perusahaan konsesi Sawit Mandiri Lestari. Nah ini kalau kita pelajari kronologisnya Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Ini sebetulnya prosesnya sudah sejak Tahun 2012 kemudian diajukan 26.950 seluas ini pada Juni 2014, kemudian Dirjen Planologi pada Tahun 2012 itu memberikan guidance sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dan kembali pada tanggal 28 Agustus 2014 menyampaikan kelengkapan persyaratan, dan kemudian diproses seluas 19.240. Kita lihat di screen 52. Kemudian Menteri Kehutanan pada tanggal 29 Agustus 2014 memberikan ijin prinsip. Jadi persetujuan prinsip seluas 19.240. Jadi dengan demikian maka dia mendapatkan ijin pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh BKPM pada bulan Maret 2015. Karena apa? Karena ijin prinsipnya sudah ada Pak Ketua. Jadi secara prosedur memang harus diikuti dengan ijin. Kemudian dia mendapatkan HGU pada bulan Agustus 2017, dan telaahan. Memang BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) secara dokumen bersama-sama dengan yang lain kira-kira mungkin diatas 6 Juta sampai 8 Juta hektar itu melaporkan kepada KLHK wilayah-wilayah yang diminta untuk menjadi wilayah hutan adat. Nah itu diperiksa satu per satu, di cek semuanya dari segala aspek oleh PSKL Planologi dan PHPL, lalu kemudian pada bulan September kemudian kemarin terjadi konsultasi. Kalau kita lihat posisi masalahnya. Ini gambaran penutupan lahannya. Kalau kita lihat kondisinya di screen berikutnya, nah kalau lihat foto satelitnya Bapak Pimpinan, dan Ibu

dan Bapak Anggota yang kami hormati, itu yang warnanya terang itu areal sawitnya, yang hijau-hijau itu berarti sudah ada tanamannya, yang makin terang ke atas itu berarti dia baru mau buka.

Kemudian kalau kita lihat datanya, terus. Nah ini berarti ada areal si konsesi yang berada di dalam klaimnya Kinipan yaitu 906 hektar. Jadi yang garis merah itu adalah batas Desa, yang arsir hitam itu adalah areal konsesi. Nah diluar konsesi swasta juga ada wilayahnya Kinipan 5274 hektar. Jadi berarti hutan adat yang dia minta itu adalah 5000 diluar konsesi, dan 906 didalam konsesi. ... (suara tidak jelas).

Terus berikutnya, nah ini jumlah penduduknya disana 198 KK itu batas merahnya. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah ini dari data lapangan pada tanggal 9 dan 10 September Pimpinan yang terhormat Pimpinan Komisi IV dan yang terhormat Anggota Pak Darori, dan Pak Wamen sudah meng-*collect* seluruh datanya, dan juga kalau kita lihat di halaman (mohon periksa di halaman 60-62) itu adalah catatan-catatan aspirasi masyarakat. Jadi Tim ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamen kepada kami itu mendapatkan informasi yang lengkap dari stakeholder yang lengkap karena ketemu pemegang ijin konsesi, ketemu juga masyarakat, ketemu juga official yaitu Desa dan Kabupaten. Jadi dokumentasinya juga bisa dilihat. Dan oleh karena Pak Ketua, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Cara menyelesaikannya, kami mempersiapkan bersama-sama dengan arahan yang terhormat Pimpinan dan Anggota yang dilapangan pada saat itu ya Pak Wamen ya terhadap klaim wilayah adat, Desa Kinipan dapat diakomodir melalui skema hutan adat atau pun hutan sosial dengan mempertimbangkan aspirasi pada areal yang masih berhutan. Terhadap masyarakat Desa yang setuju dengan adanya plasma dapat diakomodir. Terhadap masyarakat di luar Desa yang telah melakukan kerjasama dapat saja berlangsung. Nah proses penetapan hutan adat sebetulnya kalau kita lihat skemanya. Jadi kalau dia arealnya di luar hutan maka sebetulnya Pak Bupati sudah bisa mengambil langkah, tidak perlu pakai Perda, dan bisa menetapkan juga masyarakat adatnya. Lalu hutan adatnya bisa diidentifikasi areal-areal yang masih berhutan, kemudian permohonan penetapan hutan adatnya kepada KLHK sudah ada. Jadi kita verifikasi lapangan, dan nanti kalau berjalan kan Pak Bupatinya akan menyelesaikan didalam hal pengakuannya. Dan nanti kita akan bisa keluarkan SK Hutan Adatnya.

Sementara proses penetapan Hutan Adat yang diluar areal pelepasan tadi yang 5200 hektar, itu penetapan wilayahnya ada, kemudian bisa kita identifikasi untuk hutan sosial, kemudian permohonan hutan sosial dan bisa diselesaikan.

Jadi dengan demikian Bapak Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat,

Saya berterima kasih atas *Guidance* dan dukungan politis Pimpinan Komisi IV dan Anggota bersama Pak Wamen di lapangan yang bisa membuat ini juga jadi sejuk.

Terima kasih Bapak Ketua yang terhormat, Pimpinan Komisi IV DPR RI, dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ini nampaknya kalau 2012 ini untuk kasus pelepasan kehutanan paling gampang. Pak Sigit, saya minta tolong kasih saya kawasan pelepasan hutan maupun pinjam pakai tambang periode 2009 sampai 2014. Karena kalau tidak salah ya Kanjeng betul tidak? Ada tidak 4 Juta? Ada. Kanjeng dapat bagian tidak itu ikutnya? Banyak. Pak Sigit saya minta tolong nama PT, alamat, luasannya. Karena saya ini selalu di bully diluar. Jadi Ketua Komisi kok tidak ngerti masalah ini.

Ya silakan.

KETUA RAPAT (RIEZKY APRILIA, S.H.,M.H.):

Ijin senior.

Pertanyaan pertama dari Pak Darori.

Silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya terima kasih.

Bu Menteri, Pak Wamen, teman-teman Eselon I, Pak Ketua, dan Anggota yang saya hormati,

Jadi yang pertama saya ini yang komentar Ibu. Kami turun kesana Pak Ketua, perjalanan 3 jam $\frac{1}{2}$ tidak sampai lokasi karena banjir. Mungkin bisa nyebrang bisa tidak pulang itu, ya Pak Wamen ya, karena airnya semakin tinggi. Tadinya se-dada, tapi mungkin Pak Wamen. Kalau saya sedada, Pak Wamen bisa se-kepala itu kan. Jadi kita balik ya. Tapi sebelum sampai lokasi, kita bertemu dengan unsur Muspida Kabupaten Lamando juga dengan masyarakat semuanya, dan disitu pertemuannya itu bagus jalan, terbuka.

Jadi begini, ini saya potong saja. Tolong jangan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan Bu. Kenapa? Tadi Ibu menyampaikan Tahun 2012 permohonannya itu 26.000 hektar, arahan dari Dirjen Planologi yang layak itu hanya 4700. Itu dengan suratnya Planologi Nomor: 883 Tahun 2012, tanggal 29 November 2012. Nah terus perusahaan melengkapi. Nah Dirjen Plano itu kepada Sekjen membuat surat, tapi suratnya itu tanggal 20 Agustus 2014, memberi pertimbangan teknis kepada Sekjen. Justru area yang dimohon itu

diarahkan dari 26.000 itu yang layak itu 19.240. Ini jadi pertanyaan Bu. Jadi 4000 jadi naik 19.000. Ini ada yang nanya ke saya kemarin tapi saya tidak jawab.

Yang kedua, jual HGU 9000. Kalau dilihat tutupan lahannya Bu pada awalnya itu sebetulnya kita sudah paham. Jadi lahannya itu memang sudah tidak virgin forest, tidak luas, sudah hutan lahan kering sekunder 17.000. Artinya sudah ada permukiman disana. Tanah terbuka, ada belukar muda. Jadi dari 26.000 itu tidak ada yang betul-betul hutan yang sudah. Nah persetujuannya dari Menhut Pak Ketua, itu 19.240 ini tanggal 29 Agustus 2014. Nah disinilah Bu kita ada kesilapan ya mungkin atau memang model lama, tidak ada bahwa itu ada penduduk, langsung 19.000. Kesannya itu sudah milik perusahaan, urusan tidak salah. Ini saya dikasih 19.000. Yang saya garap semua, entah apa yang didalamnya. Kedepannya Bu kalau ada pelepasan saran saya enclave-enclave Bu. Hutan cadangan misalnya. Ini perlu. Kalau tidak ini, ini masalah ini di paling banyak kayak gini Bu. Saya kira Pak Wamen, saya kira tugas disana pun tidak bisa pulang-pulang kalau ditugasin urus ini, banyak sekali Bu. Sudah mulai muncul yang lain, enclave itu. Nah kalau sudah Ibu lepas ini sebetulnya tidak tanggung jawab lagi karena sudah pelapasan, sudah APL itu. Jadi kalau Ibu mau atur yang 19.000 itu jadi kawasan untuk tanah adat itu darimana. Karena itu sudah dilepas. Nah 1 sisi, diarahkan dari Dirjen atau Menteri tidak ada. Apabila didalamnya ada penduduk dan ini itu-itu agar dikeluarkan juga ada. Tidak ada itu disuratnya. Saya baca suratnya. Saya dapat dari perusahaan. Dari perusahaan mengatakan begitu.

Nah terus begini Bu, Pak Ketua, kenapa Perda itu sulit? Tidak mau Bupati, yang ada duitnya pengusaha. Kalau rakyat tidak mungkin mau diPerdakan, merugikan malah oleh pengusaha makanya jarang sekali ada kawasan untuk tanah adat itu diPerdakan. Rakyatnya sudah tidak punya duit, tidak ada yang ngurus, perusahaannya yang nyerang terus. Ini milik saya, ini milik saya. Nah ini ada 2 sisi yang perlu kita perbaiki kedepan. Setiap pelepasan itu yang rill itu berapa didalamnya ada penduduk. Dibiaya perusahaan Bu. Ini pengalaman ini saya baru dapatkan ya setelah sama kemarin. Nah tuntutan masyarakat itu Pak Wamen bukan ini saja. Tolong jangan sampai ini (siapa itu) Buhing itu dikasih, yang lain akan menuntut.

Jadi Pak Ketua, ada 10 tuntutan dari masyarakat sudah saya berikan pada pengusaha suruh menjawab. Tolong jawab, kenapa anda dimusuhi rakyat? Ya memang pengusaha ini pertama waktu ketemu kaget ya Pak Wamen ya. Mohon maaf saya baru ketemu dengan Pak Darori, dulu banyak masalah dengan Pak Darori. Karena dia pemain illegal logging Pak, cukong-cukongnya. Pencuri iyalah (podo waelah). Dan Gubernurnya, Bupatiya ponakannya Bu. Ponakannya pencuri kayulah. Dulu. Dan dia kemarin bilang sama saya akan berbuat baik kedepan Pak, Alhamdulillah. Kalau orang berbuat baik masa tidak dikasih ya Pak Wamen ya. Saya pun dulu nyari-nyari dia, tapi memang luar biasa. Di jaga ketat itu dulu. Kita sampai hampir kontak senjata beberapa kali lagi. Paling ketemu sudah punya helicopter Bu, kaget saya. Bu Menteri saja belum punya itu. Jadi itu Pak intinya. Jadi saya kira. Sebetulnya rencana Ketua mau manggil perusahaan sangat baik, clear

semua. Karena masalahnya disana itu masyarakat, penduduk setempat sudah banyak, pendatang juga banyak, terutama orang Jawa Saudara-Saudara saya Pak banyak disana. Jadi itulah intinya Pak Ketua. Jadi kedepan harus hati-hati, karena Pak Ketua sudah membentuk Panja pelepasan kawasannya. Jadi saya baru dapat disana di WA itu. Ini tolong Pak Dirjen Pak Sigit oleh-oleh menjelang pensiunlah, pekerjaan berat ini harus disiapkan hingga kita bisa cepat. Itu saya kira intinya, nanti kalau itu sudah kami buat Pak Ketua panjang lebar ini.

Ada tambahan Pak Ketua?

Pemerintah?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi begini Kanjeng, setahu saya kalau statusnya itu sudah APL ada 2 jalan, masyarakat penghuni diganti keluarkan atau lokasinya di enclave, kan begitu. Kalau didalam SK itu tidak ada berarti Pejabatnya goblok. Gobloknya itu karena sesuatu.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya itu Pak Sudin ya yang ngomong. Saya tidak ngomong gitu.

KETUA RAPAT:

Waktu itu ada Beliau masalahnya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Eggak ah. Saya sudah 2014 saya sudah.

KETUA RAPAT:

2012 ... (suara tidak jelas).

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

2012 saya sudah mundur Pak.

KETUA RAPAT:

Oh sudah?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Sudah? Kalau masih ada saya tidak akan jadi begini Pak, katanya. Ya Bu ya?

KETUA RAPAT:

Karena harus jelas. Setahu saya itu yang nama lokasi dari itu turun hak jadi APL, apabila ada masyarakat disuruh keluar ganti rugi. Yang ada tanam tumbuh harus diganti sesuai peraturan yang biasanya setiap Daerah beda, pohon keras atau pohon apa. Selalu ada ini aturannya. Tapi mungkin karena penguasanya disana sekeliling mereka semua ya tidak bisa.

Jadi Mbak Ita dijadwalkan dalam Panja nanti, pengusaha yang kita panggil di Kalimantan Tengah dulu. Sekali panggil minimal 10, karena yang kena masalah banyak. Nanti dalam kesimpulan rapat saya minta dimasukan.

Yang Bu Pimpinan, silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Saya tambah Pak Ketua, Bu Menteri.

Ternyata laporan dari Kejari, saya ngobrol sama Kapolres memang disana seperti apa yang pernah saya sampaikan banyak kebun yang tidak punya ijin Bu. Ini juga harus segera ditindaklanjuti. Saya sudah minta kepada Bupati, Kapolres sama Kejari tolong segera ditindaklanjuti seperti apa kondisi yang 18 perusahaan itu yang tanpa ijin sekarang itu. Karena apa Bu? Karena ternyata lokasi ini dulunya sebagian ada yang tidak ada ijinnya Bu, diputihkan itu. Jadi ini perlu detailiniasi, saya minta tidak su'udzon. Sebenarnya ini seperti apa. Tapi saya dengar ini laporan terbuka. Bupatinya jadi karena dibiayai oleh cukong ini. Itu pengakuannya masyarakat itu. Bagaimana mau bertindak Pak. Saya kira ini teman-teman di KLH lebih proaktif karena Kalteng itu banyak sekali Bu. Kalau menurut hitungan dia bilang, pengusahanya sama saya. Saya paling kecil, di Kalteng kan ada 3 juta yang tanpa ijin. Bilang begitu Bu, berarti dia tahu itu.

Ini Pak Ketua, saya kira ya diduga. Tidak boleh kalau turut itu langsung nuduh. Diduga itu bisa iya, bisa tidak. Ya saya kira itu Pak Ketua.

Satu lagi Bu, ini soal TORA ... sosial, program ini bagus. Saya ditanya kenapa kok Kementerian lain tidak ada yang dukung, pembiayaannya. Tolong ini mungkin lapor ke Pak Presiden, Ibu sudah menyiapkan lahan kok lahannya dibiarkan. Ini kan perlu itu. Anggaran buat sedikit, ini dari Kementerian Sosial dan sebagainya, dan sebagainya, ini perlu gitu. Nah di Panja ini Pak Sekjen, ini kan sudah mau masuk. Kemarin ada usulan dari seluruh Fraksi setuju yang pinjam pakai jadi sewa pakai tapi belum ada frasanya, tolong ini dibuat baik jalan tol, tower, dan juga tambang. Itu digunakan untuk konservasi dan reboitasi. Kalau kemarin Pak Sekjen usulnya reboitasi, sudah ... konservasi juga perlu.

Nah yang terakhir Bu ini. Terakhir-akhir ini saya membaca di Majalah di ini agak kurang mengenakan Bu. Tolong ini Dirjen Gakkum itu panggil, periksa orangnya itu. Kalau tidak benar tahan itu, fitnah namanya itu. Nanti kita bicara khususlah. Masa penebangan Tahun '90 diceritakan sekarang.

Orang kan tidak mengerti. '90 itu kita jual kayu untuk makan, beli beras. Tapi kadang-kadang kok ditanya sekarang, kesannya seperti KLHK tidak. Terus kebakaran juga, seolah korporasi dengan perusahaan bakar hutan. Ini tolong Bu diklarifikasi jangan kita diam ya Pak Gakkum ya. Nanti kami bantulah, periksa itu LSM-nya itu. Dulu saya sering panggil periksa, tahan gitu. Takut itu. Ngomong tidak ada dasarnya gitu. Terus satwa ... hampir 50% habis, hilang itu. Yang mana? Kita juga siap-siap untuk menghadapi, untuk memperbaiki hal-hal yang seperti ini Bu. Jadi seperti usulan kami yang kemarin ada ... itu jadikan gabungan ya, ini Pak Wiratno ya kita perjuangkan sehingga satwanya kita dan populasinya semakin meningkat.

Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H. M.H.):

Selanjutnya Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Bu Ketua.

Ketua, Pimpinan, Anggota dan Bu Menteri bersama jajarannya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Hari ini kita focus pada soal pembahasan Dana Alokasi Khusus. Berapa judul yang saya baca disini, ada yang menurut menunya pengolahan persampahan, mendukung program pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan, kemudian ada kaitannya dengan penurunan stanting, kemudian ada menunya juga onlimo, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga untuk mencoba mencermati alokasi per Provinsi dan juga termasuk Kabupaten/Kota. Adapun materi ini saya melihat ada nampaknya beberapa Provinsi itu lebih dominan Komisi lain atau Kabupaten lain juga sudah nampak menonjol begitu. Nah ini menurut saya ini, misalnya ini, ini menu "pengolahan persampahan". Mendukung program pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Ini untuk Sumatera Barat tidak nampak begitu. Apakah memang Sumatera Barat ini tidak ada persampahannya. Sehingga Sumatera Barat diabaikan.

Kemudian juga untuk stanting, penurunan stanting. Sumatera Barat hanya 1 Kota yaitu Kota Solok. Padahal ini ada Daerah-Daerah lain di Sumatera Barat ini mohon dicermati ada juga Daerah-Daerah yang kondisinya masih tidak begitu baik dengan stanting ini, dan perlu diperbaiki.

Dan yang lainnya saya cermati. Demikian Bu Menteri, jadi saya melihat supaya alokasi DAK ini memandang perlu adanya pertimbanganlah atau

semacam distribusi yang lebih baik untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya memandang sangat baik apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri mesti ada efek ... (suara tidak jelas). Nah tentunya DAK ini harus mendapatkan pengawalan yang baik dan mendapatkan pengawasan yang khusus juga. Karena kalau kita mengukur efek eksternalitas ini kan harus jelas, baik alokasi, tempat dan efeknya terhadap output dan outcomenya. Nah ini tentunya ini adanya pertumbuhan unit ini ekonomi yang baru dari suatu program ini. Nah ini tentu saya meminta supaya ada pengawalan khusus, pembinaan khusus terhadap program-program ini sehingga dampak eksternalitas daripada program ini betul-betul bisa diukur, bisa dirasa, dan nyata di masyarakat.

Kemudian yang ketiga yang terakhir, di Sumatera Barat ini sekarang sedang ada pembangunan jalan tol. Dan itu sudah dimulai dari Kota Padang menuju ke arah Pekanbaru. Bu Menteri juga perlu mengetahui bahwa di Daerah Sumatera Barat ini, ini lahannya itu adalah semuanya memiliki konsep tanah adat. Jadi di Sumatera Barat itu tidak ada 1 jengkal tanah yang tidak memiliki pemiliknnya. Jadi pemiliknnya itu adalah kalau tidak perseorangan ya adat. Nah saya melihat ada di kawasan tertentu yang menjadikan jalan tol itu, itu ada juga ada nanti kawasan hutan. Saya minta betul ini supaya walaupun bukan kawasan hutan itu ada terjadi konflik antara pembebasan pada saat mau di eksekusi itu masyarakatnya protes itu untuk minta diselesaikan secara berkeadilan. Nah ini saya melihat supaya Bu Menteri ini betul-betul mencermati lahan-lahan untuk jalan tol itu betul-betuk minimum bersinggungan dengan kawasan hutan supaya tidak mengganggu kawasan hutan di Sumatera Barat itu.

Demikian Bu Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum saya lanjutkan. Saya mohon atensi teman-teman karena waktu rapat kita ini kan terbatas. Jadi kalau bisa langsung to the point saja.

Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan sementara.

Ibu Menteri, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya coba untuk to the point. Ibu, saya membaca jawaban dari Kementerian LHK pada waktu Raker sebelumnya atas pertanyaan saya.

Sebenarnya yang saya tanyakan itu bukan terkait perijinan hutan harapannya Ibu tetapi yang saya pertanyakan adalah pemberian ijin atas jalan tambang di kawasan hutan harapan tersebut. Saya kira Ibu pasti memahami arah pertanyaan saya karena memang banyak sekali laporan kami yang sudah masuk ke kami, termasuk juga ke Fraksi sebenarnya yang terkait keberatan dari berbagai elemen masyarakat yang ada disana terkait dengan ijin jalan tambang itu. Bahkan ada beberapa opsi yang coba diusulkan oleh mereka. Jadi bukan jalan tambangnya yang sebenarnya ditolak akan tetapi penempatan jalan tambang itu yang menurut mereka akan mengancam banyak hal. Mulai dari biodiversity, kemudian juga hak dari masyarakat Melayu local disitu, ada 200-an lebihlah 9 atau apa ya yang tinggal disana dan seterusnya. Belum lagi kemudian bahwa hutan harapan ini justru yang diharapkan menjadi bagian dari penyumbang untuk pengurangan gas emisi. Sementara di Indonesia sendiri melalui Kementerian LHK justru mendapatkan penghargaan internasional atas upaya-upaya dari Kementerian ini untuk secara serius mengurangi emisi itu. Nah ini kan akhirnya menjadi kontradiksi antara apa yang dicapai dan kemudian apa yang dikeluarkan dari efek kebijakan itu. Nanti mohon tanggapannya. Dan sekaligus, mohon maaf karena ini Pimpinan Komisi tidak ditempat tetapi karena ada yang sementara juga teman-teman dari elemen masyarakat yang keberatan sebenarnya ingin untuk dimediasi mempertemukan antara Komisi IV dengan Kementerian LHK. Nah saya kira mungkin juga butuh respon dari Komisi IV terkait dengan rencana jalan tambang tersebut.

Nah yang kedua yang terkait dengan food estate. Tadi kita baru rapat juga dengan Kementerian Pertanian Ibu terus terang saja, bahwa salah satu dari kesepakatan pertemuan di sampaikan bahwa Komisi IV ini belum bisa menerima sepenuhnya yang terkait dengan food estate itu karena membutuhkan pendalaman dan seterusnya termasuk juga hal-hal yang perlu didiskusikan dengan LHK. Nah saya kira ini momen yang sangat penting tetapi kalau dilihat dari apa yang disajikan ya, materi yang disampaikan oleh LHK ini memang sangat optimistic bahwa food estate di Kalteng ini bahkan disebut sebagai satu *project* yang memang sangat penting untuk pengembangan pangan nasional dan lain sebagainya. Seberapa optimis sih sebenarnya dan seberapa mungkin. Karena apa? Karena kekhawatiran kita ini justru disini ini tempatnya. Kita semula berharap nih termasuk juga banyak element masyarakat yang khawatir dengan adanya food estate itu sehingga Kementerian LHK diharapkan menjadi garda terdepan untuk bisa memberikan penilaian yang sangat objektif terkait dengan rencana food estate itu. Nah kalau dilihat dari sini, ini sih sebenarnya malah berada di posisi yang menjadi juru bicara terbaik ini untuk rencana food estate itu. Jadi mohon tanggapannya karena kalau dilihat dari timelinenya ini kan sebenarnya project sudah sangat panjang tapi toh ternyata juga gagal dan mengapa kemudian kita tetap meneruskan itu dan apa yang mendorong kita yakin bahwa ini tidak akan menimbulkan gangguan terutama dari aspek lingkungan hidup.

Nah yang ketiga, terakhir. Ini terkait dengan rencana kegiatan yang akan datang. Terus terang saja ini saya lihat-lihat betul dari tadi ini ketika DAK misalnya, Jawa Tengah kok saya tidak pernah melihat ada Dapil saya tersebut disini. Tapi ya tidak apa-apalah, itu menyusul. Tetapi saya senang

ketika stunting itu menjadi salah satu pertimbangan untuk rencana program kedepan. Hanya saja sekali lagi Ibu, saya mau kasih informasi saja ketika bicara tentang basis Desa stunting Kabupaten Sragen itu berdasarkan riset kesehatan nasional Tahun 2018 itu stunting disana 39,07%. Akan tetapi justru Kabupaten ini tidak masuk dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah yang oleh Ibu bahkan menjadi diantara prioritas Kabupaten-Kabupaten yang akan mendapatkan intervensi, apakah itu pengelolaan sampahnya dan lain sebagainya untuk bisa mengurangi angka stunting itu. Nah ini mungkin mohon pertimbangan untuk koreksinya.

Terima kasih.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Salom Fakhry.

Setelah Pak Salim, Pak Suhardi Duka.

F-PG (H. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Ibu Pimpinan sementara.

Ibu Menteri dan jajarannya yang kami hormati,

Karena waktu Bu saya langsung saja ke halaman 23 di pemaparan Ibu tadi, masalah lokasi DAK bidang lingkungan hidup menu pengelolaan persampahan pendukung program penurunan stunting. Disini kami melihat Bu, Aceh memang tidak ada Bu ya. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa, mungkin tahun depan. Karena sekedar mengingatkan Bu, mitra Ibu Aceh disini 3 orang Bu. Itu yang khusus di halaman 23.

Selanjutnya menuju ke halaman 28, sama juga masalah DAK. Menu RHL mendukung program ketahanan pangan. Disini juga kami baca memang ada Bu, disini dapat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Gayo Luwes (3 lokasi). Cuma seperti yang kami katakan rapat beberapa hari yang lalu Bu, andaikan dapat pun kalau daerah kelahiran kita tidak dapat ini pun menjadi pertanyaan. Makanya kami selalu beri masukan kepada Bapak Sekjen dan jajarannya, kalau memang ada tolong di koordinasikan dengan Anggota DPR Daerah Pemilihan dimana kelahirannya. Tidak salah Bu. Ada beberapa Kabupaten bersyukur, di Aceh juga dapat Cuma kan aneh juga Bu tempat kami sendiri tidak dapat.

Selanjutnya ke halaman 39, ini juga sama Bu. Lingkungan alat ekonomi produktif mendukung program ketahanan pangan. Sama juga kasusnya Bu, ini malah Dapil saya tidak ada satu pun Bu. Ini juga mohon perhatian Ibu. Mengapa ini Bu tidak ada? Kalau memang ini tidak memenuhi persyaratan apa persyaratan yang perlu kami penuhi katakana sejujurnya.

Malu kami Bu, malu kami Pak Sekjen kalau tempat kami sendiri tidak ada yang dapat. Dalam arti kata bukan Ibu abaikan Provinsi Aceh. Cuma di halaman 23 tadi sangat lucu Bu. 3 kami di Komisi IV tidak ada satu pun. Ini juga mohon perhatian daripada Ibu.

Terima kasih. Lebih bagus Ibu Pimpinan, halus-halus kita ngomong sama Ibu nih supaya kasihan sama kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Bu Menteri, Pak Wamen, jajaran Eselon I, Pimpinan sementara dan rekan sekalian.

Saya mendukung Pak Salim tadi pernyataannya. Saya kira memang kita dalam situasi sulit kalau mempertentangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan, dan sering memang kala kepentingan jangka panjang ketimbang dengan kepentingan jangka pendek. Tapi saya kira apa pun yang penting prosedurnya dilalui saya kira tidak ada masalah. Yang terhadap sedikit mengenai hutan adat. Saya juga pernah Bupati, pernah ingin bikin Perda tentang hutan adat itu tetapi definisi tentang hutan adat itu perlu diperjelas. Karena jangan sampai setelah di Perdakan kemudian diberikan dan dijadikan sebagai milik turun temurun orang perorangan. Sedangkan sesungguhnya kita adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan public lokal maksud saya. Bukan untuk adat secara orang perorang. Jadi memang ini yang perlu kita definisikan dengan tepat.

Yang kedua, terhadap pengendalian akibat dampak lingkungan. Ini semua ke PU. PU ini yang dikerjakan itu jalan, jembatan, pengairan. Kurang perhatiannya kepada pengendalian dampak lingkungan, sehingga ini menjadi tertinggal. Di satu sisi KLHK hanya mengurus hal-hal yang kecil. Nanti longsor lagi, baru dibikin lagi DAM-DAM kecil untuk pengendalian, sedangkan sesungguhnya ini perlu kajian yang mendalam bahwa kalau pengendalian dampak lingkungan ini tidak berada di KLHK saya yakin tidak akan tertangani dengan baik, dan anggarannya itu tidak hanya 100 sampai dengan 500 Juta, ini anggarannya bisa Miliaran Rupiah. Katakanlah pengendalian aliran sungai dan lain sebagainya.

Yang terakhir adalah terhadap angka-angka dari rancangan 2021. Saya tidak bisa mengkritisi karena angka-angkanya tidak ada, dan juga saya lihat kecil-kecil sehingga itu saya mendukung tadi Pak Fakhry supaya Dapilnya kita ini bisa betul-betul dipahami dan ada manfaat kehadiran kita disini dengan KLHK. Saya 6 Kabupaten 1 Dapil, tapi saya tinggal di Mamuju.

Tempat kelahiran saya di Mamuju Pak Fakhry. 5 tak dapat tapi Mamuju, iya itu.

Kemudian yang paling terakhir juga adalah seperti paket wisata hutan. Ini di Sulawesi Barat belum ada. Saya minta supaya ini menjadi 1 contoh juga mungkin di program di kawasan Sulawesi Barat.

Terima kasih.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum masuk ke virtual, saya minta teman-teman yang virtual standby, waktu tidak panjang.

Ibu Alien Mus, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Pimpinan bayangan, dan juga Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi IV yang saya muliakan, Ibu Menteri, Bapak Sekjen, Bapak Wamen, Bu Irjen, serta jajaran Eselon I yang saya muliakan juga.

Langsung saja karena memang ini waktu Bu. Tadi sudah Ibu paparkan mengenai RHL di halaman 32 kalau tidak salah. Nah ini memang kita focus sekali kalau masuk dalam Dapil-Dapil nih Bu Menteri karena memang selalu saya sampaikan bahwa di Maluku Utara adalah Daerah yang betul-betul dengan banyak sekali kekayaan alam yang pastinya ada pertambangan, dan juga disitu kita melihat beberapa waktu lalu ada pencemaran di laut, dan saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi meminta ijin yang dikeluarkan dari Tahun 2009-2014 tentang pertambangan. Kalau bisa Ketua ditambah lagi sampai Tahun 2018, kalau bisa Ketua. Ya maksudnya nanti dari Ketua, Ketua yang ini, kan kita tidak bisa minta langsung kalau tidak diijinin. Seperti itu saja.

Terus, tolong juga focus dalam kemarin waktu RDP dengan Pak Sekjen saya sudah sampaikan bagaimana untuk pengalokasian DAK diseluruh Provinsi berdasarkan basis dari Dapil seluruh Anggota Komisi IV. Kan kita ketahui bersama Bu Menteri, untuk penyerapan anggaran DAK ini

kadang per Kabupaten/Kota dan Provinsi ini ada penundaan dan penyerapannya kurang bagus misalkan, apakah diberikan finalty atau penyampaian yang lebih baik atau mungkin pengalokasiannya bisa digantikan ke apa yang diusung oleh para Anggota Komisi.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak Bambang Purwanto, tolong mengingat waktu Pak 2 menit maksimal Pak.

Pak Bambang Purwanto, panggilan pertama.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Siap.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, seluruh Anggota, serta Ibu Menteri yang saya hormati.

Yang pertama terkait dengan realisasi anggaran yang sampai saat ini masih sedangkan waktu tinggal 3 bulan efektif. Oleh karena itu kami mengingatkan supaya ini betul-betul menjadi perhatian dari LHK.

Kemudian terkait dengan operasional kebakaran hutan dan lahan. Yang menjadi persoalan dari Kepala Daerah karena yaitu harus ada penetapan kondisi darurat seperti dulu. Rata-rata Kepala Daerah ini enggan untuk membuat keputusan itu, sedangkan operasional helicopter itu pasti menunggu kondisi darurat. Nah ini saya kira perlu diberikan kemudahan.

Kemudian saya mengingatkan untuk operasional helicopter manakala terkait dengan lahan gambut. Pengalaman saya di lapangan itu tidak menggunakan helicopter karena akan memperparah kondisi kebakaran. Kalau lahan mineral itu cukup efektif.

Kemudian selanjutnya terkait dengan Dapil Kalimantan Tengah ini luasnya 1,5 kali Pulau Jawa Bu. Dari kemarin ada bantuan bibit aliran sungai (DAS) itu hanya mendapatkan alokasi 20.000 sehingga sulit kami untuk membagikan, sehingga ini kami minta untuk ditambah alokasinya. Karena rata-rata disana itu banyak sungai-sungai besar dan saat ini sudah mulai banjir sehingga perlu mendapat perhatian.

Kemudian terkait dengan Kinipan. Seperti apa yang disampaikan Pak Darori tadi dan skema penyelesaian memang sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Saran saya jangan sekaligus ngundang. Jadi Kepala Desa, dan tokoh masyarakat baik yang pro dan kontra itu dipanggil sendiri, baru kemudian dipanggil Kepala Daerah dan perusahaannya. Kalau dijadikan satu saya yakin mereka tidak akan berani. Sehingga ini perlu mekanisme yang berbeda. Karena apa? Karena kalau nanti dipanggil jadi satu mereka tidak akan berani bicara. Sedangkan saat ini mereka sangat berharap kepada Kementerian LHK dan DPR RI Komisi IV dalam rangka penyelesaian Kinipan ini. Dan ini sudah meluas sampai ke seluruh Pulau Kalimantan. Protes sangat banyak sehingga kalau penyelesaian ini tidak komprehensif saya khawatir tingkat kepercayaan masyarakat akan hilang terhadap Kementerian maupun DPR RI Komisi IV khususnya.

Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan perlu menjadi pemikiran lingkungan-lingkungan itu terkait dengan ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Maaf Pak, putus.

Pak Slamet, jangan lama Pak. 2 menit maksimal.

F-PKS (Drh. H. SLAMET):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Pak Ketua, dan rekan-rekan seluruh Anggota, Ibu Menteri dan seluruh jajaran.

Ada 2 hal saja. Yang pertama terkait konfirmasi Bu Menteri dalam RDP kemarin saya sampaikan ada catatan di slide yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ada program dukungan untuk pembukaan Ibukota Baru senilai 26,8 Miliar. Nah ini saya sampaikan bahwa Bapenas juga sudah mengatakan ditunda. Terkait dengan tema APBN 2021, temanya adalah recovery Saya ingin mendapatkan penjelasan, itu tetap ada atau dialokasikan ke yang lain. Itu satu.

Yang kedua Bu, sama dengan Anggota yang lain terkait dengan indikasi DAK. Saya ingin sampaikan, ini bukan kebanggaan tapi sebenarnya malu hanya perlu saya sampaikan. Angka stunting di Kabupaten Sukabumi itu 40% Bu. Ini berdasarkan riset kesehatan dasar, dan termasuk 100 Lokus Kota/Kabupaten se-Indonesia Bu ini. Nah saya lihat di program indikasi DAK untuk persampahan yang mendukung program penerimaan stunting di suatu Sukabumi juga tidak masuk. Nah ini perlu penjelasan. Termasuk juga untuk menu alat ekonomi kreatif. Ini Kabupaten Sukabumi diantara Jawa Barat yang ada juga tidak masuk, sementara saya lihat dari beberapa Dapil teman di Jawa Barat masuk. Mungkin perlu penjelasan.

Itu saja Bu Pimpinan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Endang. 2 menit ya Ibu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Ya terima kasih Mbak Kiki.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Menteri LHK dan Pak Wamen, kemudian para Dirjen, para Sekjen ... yang saya hormati.

Jadi ada beberapa yang sangat menggelitik tadi Bu Menteri, stanting sama Bu, Kabupaten Cianjur tidak termasuk malahan Kabupaten Bogor masuk. Padahal Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur stantingnya tinggi.

Yang kedua rendahnya realisasi dari 4 Direktorat Jenderal di Tahun 2020. Nah ini apakah bisa dikebut Bu, padahal waktunya tinggal 3 bulan lagi. Nah jadi ada beberapa program kerja yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Yang kedua tentang pengelolaan sampah dan limbah. Saya sangat kagum dengan Ibu Vivin. Namun apakah dalam pelaksanaan di aplikasinya, dilapangan ada *reward and punishment*.

Yang ketiga tentang Karhutla Bu. Jadi saya mohon bagaimana tentang implementasinya di lapangan, karena Karhutla ini kan juga penting Bu, dan berapa sebetulnya yang dialokasikan untuk pembenihan, sepertinya kita belum punya schedule yang tepat. Jadi mohon ini diperhatikan oleh para perencana kita. Nah kemudian program kerja yang Tahun Anggaran yang 2020 ini sangat rendah realisasinya. Nah mungkin apakah bisa dialihkan ke yang lain Bu? Nah jadi saya mohon program-program prioritas nasional itu diutamakan.

Nah kemudian program kerja tadi. Rencana Kerja Direktorat Jenderal PS RD3 nih Bu sebagai program prioritas nasional apakah bisa dijadikan prioritas utama terutama untuk B3 di Yankes.

Kemudian ada beberapa kendala tentang pengendalian DAS dan hutan lindung Ibu khususnya di Cianjur. Nah mudah-mudahan saya sudah WA ke Pak Sekjen dan Ibu Menteri, semuanya sudah saya cantumkan lokasi-lokasi yang perlu perhatian untuk pengendalian DAS dan hutan lindung.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Tadi Pak Hasan Aminuddin interupsi mau nanya atau bagaimana Pak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bu Menteri yang saya hormati,

Saya mohon ada perubahan draft itu sebagaimana permintaan teman-teman baik DAK maupun regular, nanti biar Pak Ketua yang memperjelas untuk menjadi kesimpulan. Regulernya 100, bagaimana 50% berikan Pak Ketua untuk distribusikan ke Anggota.

Yang kedua Pak Direktur Inhutani. Tema 2021 ini pemulihan ekonomi. Bagaimana tetangga hutan itu bekerja semua sehingga Covid-19 ini benar-benar rakyat makan.

Terima kasih Bu Kiki.

Dilanjut.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasan, ditunggu kehadirannya di ruang KK IV.

Silakan saya kembalikan kepada Pimpinan Komisi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Minggu depan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Saya persilakan Saudara Menteri untuk menjawab, dan saya minta pengalaman saya dari Kanjeng setelah dijawab harus ada jawaban tertulis supaya jangan nanti keluar catatannya disobek.

Ya silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (Dr. Ir. SITI NURABAYA BAKAR, M.Sc.) :

Terima kasih Ketua yang saya hormati.

Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Pak Ketua yang kami hormati,

Kelihatannya yang paling saya harus respon adalah terkait dengan DAK karena kuncinya disitu. Saya sejak awal tadi sudah mengatakan bahwa saya justru minta mendapatkan dukungan tentang DAK ini. Kenapa? Karena DAK itu bukan LHK yang mengusulkan. DAK itu mekanisme prinsipnya bahwa dia harus diusulkan oleh Kabupatennya yang bersangkutan. Artinya apa? Artinya di Badan Anggaran, di Keuangan Bappenas itu harus didorong bahwa itu ruang prioritasnya boleh dibuka. Itu satu sisi, dan itu kapasitasnya tidak ada di saya. Justru saya minta tolong di yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang kedua, mekanismenya dalam prinsipnya adalah dia harus diusulkan oleh Kabupaten. Tadi saya tanya sama karoren, selama ini. Saya dulu di Bapeda, jadi saya tahu juga Ketua. Kalau dulu sih memang kalau rapat selalu bareng-bareng. Kementerian Teknis diajak Dagri sama Bappenas tapi sekarang kelihatannya tidak terlalu. Karena usulannya dari Kabupaten itu ke Keuangan ke Bappenas. Masuk ke Dagri, tembusannya KLHK.

KETUA RAPAT:

Cuma kadang-kadang begini, misalnya Kepala Daerah diundang sama Presiden langsung akan diberikan wejangan atau Rapat selama 2 hari atau 3 hari. Saya jamin, begitu Presidennya pulang Kepala Daerahnya juga pulang. Biasanya yang nunggu Sekda, atau acc 1, atau acc 2. Betul kan Bu? Itu sering sekali saya dapat laporan seperti itu. Jadi bagaimana mereka mau fokus masalah DAK. Cobalah kita lihat. Seberapa banyak sih Kabupaten yang kemajuannya signifikan setiap tahun atau setiap penggantian Kepala Daerah. Itu saja kita lihat dari sisi itu deh.

Lanjutkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua.

Saya justru sedang memikirkan mungkin tidak kita jadi yang mendorong mereka dengan pemahaman, pengertian, pengetahuan. Mungkin per wilayah. Kalau lagi ke Medan, atau kalau lagi ke Palembang misalnya kita kumpulin langsung Baksos, Bapedanya kita ajak ngobrol, misalnya seperti itu. Dulu waktu saya masih di Pemda sih cukup sering konsultasi kepada yang terhormat Anggota Dewan supaya Daerah dapat atensi. 350 Miliar itu menurut saya terlalu kecil, karena pada dasarnya DAK itu adalah sebetulnya uang yang untuk Daerah tetapi kekhususannya ditegaskan. Bolehlah ya pakai nih

duit ya, tapi untuk ini ya, untuk ini, untuk ini. Oleh karena itu memang mekanismenya dia bukan diusulkan oleh Kementerian, tetapi memang saya menyadari betul bahwa harusnya Daerah ini diajak paham bahwa dia punya prioritas. Saya minta maaf Pak Ketua yang terhormat, saya di Bapeda pada waktu yang lalu ya, tidak tahu kalau sekarang. Yang jaman dulu saya, kita merumuskan mimpi kita saja kita tidak tahu. Ini mau ngapain sih. Nah oleh karena itu memang perlu didorong. Jadi 2 sisi dorongnya dalam dukungan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota dan Pimpinan Komisi IV yaitu 1. Sisi volume, saran, dan ruang prioritasnya, 2. Kita bersama-sama kelihatannya. Saya juga coba memikirkan cara bagaimana di jalur eksekutif kami dengan Bapeda kelihatannya mungkin saya harus ... ke Bapedanya juga nanti bisa bersama-sama dengan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Kemudian berkaitan dengan realisasi. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa sebetulnya kita sudah kejar realisasi rata-rata nasional tetapi kita dengan dukungan anggaran yang baru tambahannya cukup besar sehingga dia bergeser. Tetapi kami mengikuti secara terus menerus sampai ke UPT Balai, dan sampai ke Direktorat-Direktorat itu saya coba control yang bisa atau harus, atau tidak bisa, dan lain-lain. Memang kebanyakan disitu ada kaitan dengan kontrak. Jadi mudah-mudahan realisasinya akan bisa diselesaikan.

Pak Ketua kalau boleh tadi karena banyak catatannya data. Saya kira saya akan lebih baik nanti menjawabnya dengan data dan lain-lain. Kita buat tertulis saja Pak Ketua. Karena beberapa hal saya kira memang lebih dibutuhkan juga dukungan justifikasinya dengan data dan analisis.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Boleh sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah mau kesimpulan baru nanya. Ada apa ini? Sudah nanya?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sudah.

KETUA RAPAT:

Mau nanya lagi?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya sependapat dengan Ibu Menteri, dengan usulan oleh Pemerintah Bu bukan domainnya dari Kementerian LHK. Namun yang kami maksud Bu, kalau ini sudah jelas. Tadi ada upaya Ibu untuk bagaimana mensinkronkan dengan Bapenas atau Bapeda setempat. Namun harapan kami Bu kedepannya, ada yang dari Ibu dari Kementerian LHK contoh ke Provinsi Aceh. Tolong diutamakan darimana Daerah asal Anggota tersebut. Itu yang kami maksud Bu. Kalau saya nanti Bu, malu Pak Hudoyo disini Bu. Sebab sering juga teledor ini Bu. Ada kami dapat program dari Ibu melalui aspirasi 20.000 bibit produktif. Ketika saya disuruh hubungi Bapedas saya mampu di Medan, Beliau mengatakan tidak ada Ketua, tidak ada. Aceh tidak ada disini. Nah makanya saya balik ke Pak Dirjen Hudoyo. Pak Hudoyo ya minta maaf, kan itu kerja Cuma. Makanya ini pun harapan kami kedepannya Bu. Apalagi Ibu dibantu oleh Pak Wamen dan Pak Sekjennya Bu Kiki.

Saya kira itu Bu supaya kedepannya jangan ada missed komunikasi Bu. Kami paham Ibu selalu membantu Anggota Komisi, kami juga tetap respon terhadap mitra kami Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Salim?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, kalau bisa DAK itu namanya. Sekarang di Banggar ada Ketua?

KETUA RAPAT :

Apa itu?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Mohon maaf Ketua. Ketika bulan Februari dan Maret seluruh Anggota Banggar bisa mengusulkan. Ternyata ada di setiap Kabupaten Dapil kita tertera Pak Ketua di Sumber Daya Air Cuma angka tidak ada. Aspirasi Salim Fakhry Anggota Banggar DPR RI. Rupanya tujuan supaya ini jangan tidak terbuka Ketua, apa salahnya kalau memungkinkan di Kementerian Kehutanannya Pak Darori. Aspirasi jelas Pak Ketua. Ini contoh, mungkin

pengalaman Pak Ketua sedikit waktu, Bu langsung Bu aspirasi Polan. Itu yang seluruh Anggota Banggar dapat itu sekarang Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Seharusnya kan bisa ya Bu ya. Dari awal kami mengusulkan misalnya untuk perbaikan ini, rehabilitasi ini. Bisa Pak Salim. Pak Salim jangan mentang-mentang di Banggar terus membanggakan Banggar. Kami pun di Komisi IV bisa apalagi saya sebagai Pimpinan. Anda jangan melecehkan saya seperti itu dong.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya bukan melecehkan Cuma karena ada Pimpinan baru ya Pak Sekjen ya. Pimpinan baru, Pimpinan bayangan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Santai ya Bu ya? Karena dari pagi saya sudah sangat tegang sekali Bu. Sampai gebrak meja tadi.

Dari dialog dan diskusi ini, dan masukan dari Anggota Komisi IV dengan ini kami akan membacakan kesimpulan rapat sore ini. Saya berharap sebelum sholat Maghrib sudah selesai karena waktu Isya Pak Salim mau sholat Isya. Kita bacakan kesimpulan rapat,

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima penjelasan atas realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 14 September 2020 pukul 12.00 WIB sebesar Rp3.616.049.182.528,00-. Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja dan menjadikan capaian kinerjanya sebagai bahan evaluasi, terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada Tahun berikutnya.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKAKL Tahun 2021 sebesar Rp7.957.114.783.000,00-. Dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:
- a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp546.509.240.000,00-.
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp80.613.724.000,00-.
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp342.275.694.000,00-.
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp2.177.333.560.000,00-.
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.925.381.253.000,00-.
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp410.303.585.000,00-.
 - g. **Direktorat Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp249.465.285.000,00-.
 - h. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp271.968.331.000,00-.
- (Kira-kira ini bisa tidak yang Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah ini ditambahi. Karena kalau kita lihat dalam Covid ini kan limbah medis ini makin banyak, makin apa. Coba bisa tidak Bu? Ini kan saya pikirkan begini loh, Lampung, Palembang, ini kan limbah medis ini kan tidak terkendali karena, ya kita lihatlah di TPA Bakung itu pasti banyak limbah medis. Kira-kira bisa tidak?)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ketua, boleh tidak jalan dulu saja karena toh ini kan juga dievaluasi nanti sambil berjalan kita juga akan lihat didalam pelaksanaannya nanti kan tetap bisa kembali ke Komisi IV lagi untuk melakukan *adjustment*.

KETUA RAPAT:

Oke, karena kita juga nanti kan kalau tidak ada perubahan mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ada Raker lagi ya? Tanggal 21 atau 23 mungkin bisa ada perubahan. Karena mohon maaf, yang saya pikirkan itu limbah medis kan orang buang seenaknya Bu. Di kasih kantong plastik oleh Ibu Vivin pun tetap juga mereka seenaknya saja.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit Ketua.

Kenapa Ketua saja yang dapat kantong plastik, kami kok tidak ada Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya dapatnya dari Kemensos, bukan dari Ibu Vivin. Enak saja. Kemensos itu kan teman baik saya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Kami dibawah ini sudah dapat Ketua malahan kantong sampahnya, sudah sampai.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, sedikit lagi Pak Ketua.

Ijin Pak Ketua. Boleh ya? Masalah Ibu Vivien. Jangan Ketua saja yang bantu Ibu Vivien, kami juga mau ingin bantu Pak Ketua.

Ini Pak Ketua, ada kantong sampah tadi sebagian Anggota sudah dapat. Yang lain sebagian belum. Harapan kami karena Ibu Vivin sudah tahu kita bertekad menambah anggarannya maunya ada bantuan itu pun jangan ditahan-tahan Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri bagaimana ini?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau boleh ini kita jalan dulu Ketua. Saya juga sambil lihat, karena kan limbah medis juga ada yang ditangani oleh kesehatan. Jadi saya akan cek dulu Ketua, dan nanti sumber-sumber dana yang lain seperti CSR dan lain-lain saya akan control dulu saja Ketua. Jadi ini kan kalau bisa jalan, toh selama perjalanan proses termasuk pelaksanaannya kan tetap kembali ke Komisi IV untuk bisa dilakukan perubahan-perubahan. Begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya mungkin nanti kalau ada masukan tanggal 21-23 mungkin ada perubahan kita atur kembali sambil kira-kira apa sih yang direncanakan. Iya kan. Ya Bu ya? Oke.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, suruh dijawab dulu Ibu Vivien yang belum dapat itu Pak Ketua. Sebab begini Pak Ketua ada tambahan, kalau saya tidak salah Rapat Poksi untuk anggaran ini juga ada dulu Bank Sampah, entah 500 Juta apa jadi ini tidak Cuma kami masih belum dapat Ketua.

KETUA RAPAT:

Dengar dulu saya ngomong. Waktu itu saya mengusulkan kepada Ibu Vivien untuk mengadakan membantu tong sampah untuk sekolah-sekolah SMP, SMA. Tujuannya mengedukasi anak sekolah agar membuang sampah pada tempatnya. Ya nanti kan dikasih. Kan 2021.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Berbicara 2020 Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa Abang nanti saya bikinin? Mau?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Emang kita miskin kali.

KETUA RAPAT:

Coba Ibu Vivien kantong plastik katanya ada yang dapat, ada yang tidak, tolong dijawab.

Ijin Bu Menteri.

Dijawab Bu Vivin.

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA (ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., M.Sc.):

Ijin Ibu Menteri, Pak Wamen.

Bapak, ini sedang dalam proses pengiriman barangnya. Jadi dia juga karena masalah COVID ini yang agak berat. Memang yang agak di Luar Jawa itu yang agak terhambat. Tapi kami sudah selesaikan Pak.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(suara tidak jelas).

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA:

Iya, di luar Jawa Pak. Iya ijin, nanti akan kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Saya saja baru 2 hari lalu dapat laporan, Pak ada paket isinya plastic. Itu saja.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Salah isi tidak masalah Ketua. Cuma ini hak. Kadang-kadang Kementerian ini, mohon maaf Ibu Menteri kalau kita tidak galak diam. Padahal kita bisa lebih galak.

KETUA RAPAT:

Mantap.

Lanjut.

- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp301.879.106.000,00-.
- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp344.665.771.000,00-.
- k. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp363.461.912.000,00-.
- l. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp313.243.965.000,00-.
- m. **Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi**, sebesar Rp317.017.832.000,00-.
- n. **Badan Restorasi Gambut**, sebesar Rp312.995.525.000,00-.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI :

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp700.000.000.000,00-**.
Terdiri dari:
 - a. DAK sub bidang lingkungan hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00;
 - b. DAK Sub bidang kehutanan sebesar Rp350.000.000.000,00.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menaikkan pagu anggaran bibit tanaman hutan produktif berkualitas untuk Tahun anggaran 2021.
Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI :

Setuju.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sebaik-baiknya melakukan persiapan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan Tahun 2020 yang berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika akan terjadi mulai akhir bulan Oktober 2020. Selanjutnya Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung termasuk didalamnya

peningkatan kemandirian unit pelaksana teknis atau UPT yang bertanggungjawab pada penyiapan penyediaan bibit tanaman hutan produktif dengan terus memperhatikan pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI :

Setuju Ketua.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ketua,

Saya boleh minta ijin Ketua? Yang namanya UPT itu dia tidak bisa mandiri. Karena dia hanya pelaksana dari Pemerintah (eh sorry), dia hanya pelaksana dari Dirjen. Karena UPT-UPT KLHK itu adalah UPT-UPT Dirjen. Jadi saya agak khawatir dengan, disini ada terminology kemandirian UPT. Karena itu bisa berarti macam-macam kalau bicara perkantoran Ketua. Kalau mau misalnya kinerja kapasitas, tapi kalau kemandirian itu sensenya bisa meleset begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Coba redaksinya bagaimana dibantu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Mungkin bukan “termasuk didalamnya”, tetapi “serta peningkatan”. Karena itu hal yang berbeda Ketua. Persoalan daya dukung lahan itu hal yang berbeda dari soal kapasitas UPT.

KETUA RAPAT:

Memang kalau penyiapan, penyediaan bibit tanaman, kan itu di UPT Bu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Iya betul, tapi dia tidak boleh mandiri karena pedomannya apanya semua dari.

Ketua, saya mohon ijin melaporkan juga berarti dengan situasi ini. Kita sekarang sedang mendorong PDASHL itu punya gaya kerja yang berubah. Berubah dalam arti dia tidak hanya bersandar pada kontrak-kontrak kepada pihak ketiga. Saya kira yang terhormat Pak Darori pernah memberikan *advise* juga dan juga saya memikirkan cukup lama tentang itu. Dan pola kerja dengan gaya kontrak-kontrak itu rupanya sudah belasan tahun, puluhan tahun barangkali Ketua, tetapi dengan situasi yang sekarang yang ada bahwa harus

ada aspiratif, bahwa harus ada padat karya, bahwa harus ada involvement atau keterlibatan komunitas. Jadi kita sudah kurang cocok lagi pakai pola-pola pihak ketiga. Oleh karena itu saya memang sedang merombak terus terang, dan saya sedang mengkritisi semua UPT DASHL dan saya juga punya catatan-catatan kinerja semua Kepala-Kepala DAS. Saya kira Bu Irjen memang saya tugaskan untuk itu. Bukan untuk apa-apa tetapi untuk melihat bagaimana hal-hal yang baik bisa dikembangkan. Karena memang tuntutan sudah kepada pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan, bukan soal-soal konstruksi, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Begitu situasinya Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Anggota sama Pemerintah ini setuju redaksinya atau mau diubah lagi?

Kanjeng?

Ya kalau saya lihat disini kan dia harus meningkatkan kinerja, ya UPT-nya juga bertanggungjawab pada penyiapan, penyediaan bibit tanaman hutan produktif dengan terus memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang Ibu katakan tadi, tidak mengurangi atau tidak melibatkan pihak ketiga.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Sedapat mungkin harusnya lebih baik untuk masyarakat.

KETUA RAPAT:

Berarti ini sudah paslah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Iya, masuk Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian teknis dari aspek lingkungan kehutanan atas 30.000 hektar yang lahan yang akan digunakan menjadi target tanaman pertanian pada program *Food Estate* Tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian. (Ini harus disebutkan Kabupaten dan Provinsinya. Humbang Hasundutan itu loh).

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.)

Humbang Hasundutan Pak. Saya tinggal disana lama Pak, 5 tahun Pak.

Ketua,

Saya nanya ini 30.000 darimana angkanya ini karena disana itu Daerah hulu sungai semua dan kawasan hutannya sudah diambil oleh Indo Rayon semua. Ini perlu penjelasan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Nanti saya jelasin ya Kanjeng

Bu Menteri,

Jadi Kementerian Pertanian bahwa ada lokasi 30.000 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Untuk tanam apa? Tana bawang putih dan kentang. Saya berpikir kalau lokasi untuk tanam tersebut harus diatas 1000 meter dari permukaan laut. Terus apakah tidak akan terjadi longsor, nanti kalau terjadi longsor masyarakat akan mengatakan Menteri Kehutanannya tidak benar. Reboisasinya tidak benar, padahal yang membongkar lahan untuk tanaman bawang putih adalah Kementerian Pertanian Ini maksudnya kami mengkonfirmasi. Itu loh Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ketua, boleh tidak saya memberi catatan?

KETUA RAPAT:

Silakan. Karena begini loh Bu, satu pihak bilang ada siap, dan yang hebatnya lagi untuk ini dananya sekian Ratus Miliar. Jadi saya tuh tidak mau sampai ya mohon maaf ini Menterinya pun tidak begitu mengerti nih. Jadi dibohongin oleh anak buahnya. Maka tadi itu sangat, sangat, sangat panas. Kemarin saya sampai gebrak meja sampai 2 kali *break* Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Ketua, kalau boleh saya mohon ijin menyampaikan. Mungkin bunyinya kita pakai Bahasa teknis saja Ketua. Jadi KLHK diminta melakukan namanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) secara cepat. Jadi nanti kita akan identifikasi secara keseluruhan termasuk langkah-langkahnya dan segala macam. Saya akan collect lagi semua data yang ada, dan nanti akan kami laporkan melalui Sekretariat. Tetapi Bahasa teknisnya sebetulnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat. Jadi ini sebetulnya sesuai dengan hal yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua bahwa itu ada aspek

lingkungannya sebetulnya. Saya akan tindaklanjuti, mungkin jangan lama-lama. Pak Dirjen bisa tidak 2 bulan? 1-2 bulan ini.

KETUA RAPAT:

Bu, kalau bisa jangan 2 bulan Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kelamaan?

KETUA RAPAT:

Kelamaan. Kalau data Pak Sigit ada, tinggal terjunin orang saja 5 orang kesana. 2 minggu selesai. Karena kami ini uber-uberan dengan waktunya yang mau dibangun disana. Kalau saya pun secara logika Bu sama saja, Sudin disuruh membangun membuat kebun kentang atau bawang putih di ... (suara tidak jelas).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Saya cepat saja Ketua. Itu instrument teknisnya yang ada.

KETUA RAPAT:

Cantumkan selambat-lambatnya kapan? Kalau tadi mungkin bisa 2 minggu kami cantumkan 3 minggu. Oke, cantumkan. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan. Ya saya ini kan memikirkan Ibu, kalau sampai dia gasar gusur, gasar gusur terus terjadi longsor apalagi waktunya sudah mau musim hujan.

Bu, satu lagi saya tanya. Mohon maaf ya kalau yang mau sholat maghrib tunda dulu sebentar. Tugasnya LHK dalam *Food Estate* di Kalimantan Tengah apa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Kalau di Kalimantan Tengah.

KETUA RAPAT:

Masuk gambut nanti.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Iya. Yang pasti menyakini bahwa gambutnya aman dan diperbaiki. Yang kedua bahwa menata yang hutan yang dipakai itu betul-betul tidak menurunkan fungsi dalam arti merusak lingkungan. Yang ketiga, mengatur bahwa habitat satwa tidak terganggu dan satwanya ditata. Jadi ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Kalau ada pembukaan 165.000 hektar, habitatnya terganggu tidak?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Sudah ada zonasinya. Dirjen KSDAE sudah survey, sudah bisa kelihatan. Jadi kita nanti yang akan bilang yang sebelah sini boleh, yang sebelah situ tidak boleh, yang ini bisa, yang ini tidak bisa.

KETUA RAPAT:

Oke.

Saya tanya Saudara Kepala Badan Restorasi Gambut. Dari 165.000 hektar yang direncanakan akan dibuka. 165.000 hektar itu untuk padi, beda lagi oleh Kementerian Pertahanan itu luasnya 60.000 untuk tanam singkong. Dari 165.000 ini kira-kira kedalaman gambutnya paling dalam berapa? Gambut dan rawa ya, saya ingin tahu.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Ijin Bu Menteri.

Yang kami analisis dari 165.000 ini sebetulnya sebagian besar sudah bukan gambut.

KETUA RAPAT:

Rawa?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Dia sudah tipis karena terbakar beberapa kali. Kedalaman gambutnya dibawah 50 centimeter atau bahkan sudah hilang sama sekali. Dan menurut ... kalau gambut sudah dibawah 50 centi lapisannya itu bukan lagi gambut. ...165.000 yang sebagian besar sudah bukan gambut ini, 85.000 sudah berupa sawah. Jadi hanya program intensifikasi agar bisa ditanam 2 kali dalam setahun. Jadi memperbaiki irigasi. Sisanya 79.000 ini berupa semak belukar, rumput-rumput, memang bekas terbakar. Ini yang sepengetahuan kami akan diperbaiki tata airnya agar bisa digunakan.

Demikian yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Saudara Badan Restorasi Gambut,

Terakhir kapan kesana?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Saya kesana langsung itu akhir 2019, tapi Tim kami itu baru minggu lalu dari sana.

KETUA RAPAT:

Timnya melaporkan tidak, itu sudah siap untuk tanam padi belum?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

memang sudah siap. Ini kan karena sudah mulai.

KETUA RAPAT:

Berapa luas kira-kira?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Kalau yang kita amati langsung karena kami agar tidak terjadi double anggaran, kami ditugaskan oleh Bu Menteri bekerja disekitar 250 hektar itu disamping 165.000.

KETUA RAPAT:

Berapa?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

250.

KETUA RAPAT:

250 hektar?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Iya, disamping 165.000.

KETUA RAPAT:

Kalau dalam luasan lokasi 160.000 sudah ada yang siap belum ...?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Kalau yang 85.000 karena sudah sawah saya yakin sudah siap Pak.

KETUA RAPAT:

Irigasinya dan yang lain-lainnya siap?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Iya. Kalau areal 165.000 ini memang sudah ada irigasinya walaupun harus diperbaiki, dan ini yang program Kementerian PUPR memperbaiki tahun ini agar siap tanam.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, kenapa saya tanya begini. Program PUPR itu memperbaiki yang tadi irigasi dan lain-lain itu nilainya 5 Triliun. Tapi tiba-tiba di Kementerian Pertanian ada lagi, kurang lebih 2,1 Triliun. Maka keputusan saya tadi walaupun akan bertentangan dengan Pemerintah antara lain putusan saya Komisi IV belum dapat menerima penjelasan mengenai *Food Estate*. Karena PUPR saya minta data, dia kasih data. Kurang lebih untuk perbaikannya 5 T. Kemudian pertanian, Tahun 2020 akan menanam padi kalau tidak salah 30.000. Nanamnya pakai apa? 30.000 hektar, airnya cukup atau tidak. Kalau aliran irigasinya belum siap, *Insha Allah* habis dikasih benih akan banjir, hanyut.

Pak Nasir tolong, nanti kalau timnya ke lapangan bantu saya tinjau yang 165.000 hektar.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Karena saya tidak mau Bu, ini banyak akal-akalan, tumpang tindih. Setelah saya tampilkan ini loh hasil dari Komisi V, mereka gelabakan. Tadi mereka tampil, eh kamu tidak usah ngomong, ini yang gua tampilkan kemarin ya ini saya bilang. Jadi tidak usah cari muka nampil-nampilkan lagi. Makanya yang ingin saya tanyakan, apakah LHK turut serta membantu mengeluarkan misalnya biaya untuk infrastruktur. Ternyata kan tidak, hanya membantu memantau melihat. Iya kan? Kira-kira Bu, misalnya kalau sampai 165.000 ini, ini pandangan sayalah. Saya bertanya sama Ibu-Ibu yang lebih pintar dari saya. 165.000 hektar, panen semualah, panennya tidak usah banyak-banyak. 1 hektar yang katanya bisa 6 ton, 7 ton, anggaplah 3 ton. Ini kan Pulang Pisau kan. Pulang Pisau ke Pelabuhan Besar berapa jauh. 100 kilo?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Ada pelabuhan baru dibangun di Pulang Pisau, tidak terlalu jauh Pak.

KETUA RAPAT:

Baru dibangun?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya Inshaa Allah 5 tahun lagi kan belum tentu jadi ya?

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT:

Mungkin sudah mulai operasi Pak tahun ini.

KETUA RAPAT:

Sekarang kita pikirkan, pasar terbesar itu Pulau Jawa. Mampu tidak harganya bersaing setelah sampai Pulau Jawa dengan ongkos angkutnya. Dan saya tidak yakin disana ada pelabuhan curah untuk beras. Kan gitu.

Jadi kita kembali lagi.

6. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat atas 30.000 hektar lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang direncanakan akan menjadi target areal tanaman pertanian pada program *Food Estate* Tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian dan dilaporkan kepada Komisi IV selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak Rapat Kerja hari ini.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Eselon I Kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pendalaman atas program *Food Estate* yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah.

Anggota?

Bu Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data pelepasan kawasan hutan, data ijin pinjam pakai kawasan hutan serta data keterlanjuran penggunaan kawasan hutan sejak 2009 sampai dengan tahun 2019 dalam waktu 1 minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja hari ini. (ada lah datanya itu mah. Kalau tidak ada besok saya pensiunkan dia karena sudah mau pensiun memang).

Ya Bu setuju?

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 18 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang beroperasi secara tidak procedural tanpa ijin dengan dukungan data perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan operasional non prosedural, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan pendalaman Panitia Kerja atau Panja Penggunaan dan Penyerobotan Kawasan Hutan, serta Pelepasan Kawasan Hutan.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Mohon ijin Ketua, karena bicaranya perkebunan dan juga ada keterlanjuran berarti tidak hanya dengan KLHK, harus dengan Dirjen BUN, Dirjen Perkebunan.

KETUA RAPAT:

Nanti maksudnya begini, kami kan taat pakai MD3 Bu. Jadi mohon maaf kalau yang lalu itu Pemerintah sama Pengusaha boleh jadi satu, kan tidak boleh. Ya Pak Thomas ya, Pak Tommy? Tidak boleh Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Oh jadi yang dari kita itu dibutuhkan datanya saja?

KETUA RAPAT:

Data nanti kita konfirmasi, kita panggil juga Dirjen Perkebunan. Tidak boleh Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Tidak apa-apa, datanya sih tidak ada masalah.

KETUA RAPAT:

Ya, karena yang dulu itu melanggar aturan ya tetap ditabrak. Kalau saya tidak mau. RDP adalah dengan Pemerintah, RDPU adalah dengan Umum, tidak boleh digabung. Nanti setelah kami memanggil, kami akan memanggil lagi Planologi, Gakkum dan Perkebunan. Iya kan? Kita sisir lagi, ini ada indikasi terjadi pelanggaran.

Setuju ya Bu?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Pimpinan bayangan, dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekurangan, ada kekhilafan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alamin*, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.20 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Drs. Achmad Agus Thomy
196508171988031002

